

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi serta sebagai tolak ukur rendahnya tingkat kesejahteraan. Rendahnya tingkat kehidupan merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global dikarenakan hampir semua negara tidak luput dari bahaya kemiskinan. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai keadaan ketidakmampuan seorang individu atau kelompok yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2016).

Lavitan dalam Sudarwati (2009), “Kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak”. Menurut Supardi Suparlan (1996) dalam bukunya yang berjudul “*Kemiskinan di Perkotaan*”, pengertian kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan,

kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

BKKBN mengartikan kemiskinan ke dalam konsep kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Untuk kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Mereka yang dikategorikan Keluarga Pra Sejahtera apabila tidak memenuhi salah satu dari lima indikator di bawah ini.

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
- 2) Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
- 3) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda-beda di tempatnya.
- 4) Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- 5) Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Sementara John Fiedman dalam Suyanto (2005), mengartikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial itu menurut Fiedman meliputi:

- 1) Modal yang produktif atas asset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, dan kesehatan.

- 2) Sumber keuangan, seperti income.
- 3) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti partai politik atau koperasi.
- 4) Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan memadai.
- 5) Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Masalah kemiskinan memang sudah banyak terjadi di masyarakat. Namun dalam menentukan batasan antara penduduk miskin atau tidak miskin sedikit sulit dilakukan. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memperkirakan tingkat dan jumlah penduduk miskin telah menggunakan pendekatan ekonomi. BPS mengartikan kemiskinan sebagai berikut:

Ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluarankonsumsi kebutuhan dasar makanan setara 2.100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok. Dengan kata lain, penduduk yang tingkat pendapatannya masih berada di bawah garis kemiskinan inilah yang disebut penduduk miskin.

Adapun Sudarwati (2009), mengukur kemiskinan melalui kebutuhan beras ekuivalen, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ia mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Pada awalnya Sajogyo membuat garis kemiskinan adalah setara dengan 240 kg per orang per tahun untuk perkotaan. Namun, selanjutnya ketentuan garis

kemiskinan berubah menjadi lebih rinci, yaitu dibawah 240, 240 – 320, 320 – 480, dan lebih dari 480 kg ekuivalen beras. Dengan adanya klasifikasi ini maka dapat dikelompokkan penduduk menjadi sangat miskin, miskin, berkecukupan, dan kecukupan.

Standar garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. Di Inggris, garis kemiskinan ditentukan pada 60 persen dari pendapatan menengah. Bank Dunia (*World Bank*) menentukan garis kemiskinan dengan berpatokan pada penghasilan 1,00 dolar AS per hari. Sajogyo mendasarkan pada harga beras, sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan, sebesar 2.100 kalori per hari. Jika di Indonesia memakai garis kemiskinan seperti di Inggris atau Bank Dunia, bisa dibayangkan akan semakin banyak lagi penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Adapun kriteria penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 8 variabel, diantaranya:

- 1) Luas lantai perkapita ≤ 8 m²
- 2) Jenis lantai rumah berasal dari tanah
- 3) Air minum/ketersediaan air bersih berasal dari air hujan/sumur tidak terlindung.
- 4) Jenis jamban/WC: tidak ada.
- 5) Kepemilikan asset rumah: tidak memiliki asset.
- 6) Pendapatan (total pendapatan per bulan) : ≤ 350.000

- 7) Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan) yaitu lebih dari 80 persen.
- 8) Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam): tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan merupakan pengertian kemiskinan secara umum. Standar pengukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan (BPS, 2016). Menurut BPS kebutuhan minimum makanan bagi setiap individu adalah 2.100 kalori/hari, sedangkan kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa.

Prof. Sujogyo menyatakan bahwa kemiskinan didasarkan atas harga beras, yaitu tingkat konsumsi perkapita setahun yang sama dengan beras. Terdapat perbedaan konsumsi beras untuk perkotaan dan pedesaan dimana masing-masing ditentukan yaitu sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita per tahun (BPS, 2016).

Definisi kemiskinan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Adapun hak-hak dasar yang dimaksud antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan

lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (BAPPENAS, 2004).

b. Penyebab Kemiskinan

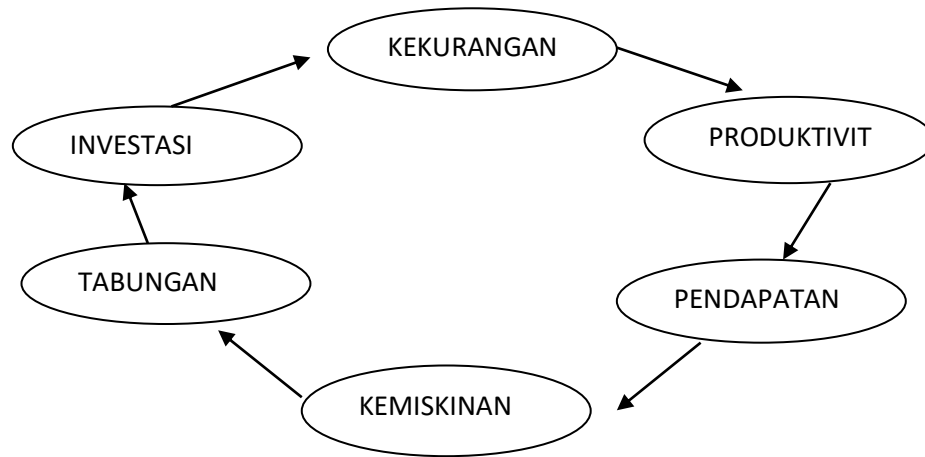
Kemiskinan ditinjau dari sumber penyebabnya dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Pengertian kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang dipengaruhi oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Pada konsep kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin walaupun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang. Ketimpangan ini dapat dilihat dari perbedaan kemampuan, kepemilikan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata.

Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: Pertama, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam memasuki dunia kerja. Kedua, rendahnya tingkat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif. Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan dan kurangnya modal untuk membuat usaha

semakin memperburuk kemiskinan, dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. Keempat, kondisi daerah yang terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkaunya. Kelima, ketidakstabilan politik dalam pemerintah berdampak pada ketidak berhasilan kebijakan *pro-poor*. Berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam implementasi jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

c. Teori Kemiskinan

Sharp, *et al* (1996) dalam Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya perbedaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Ketimpangan terjadi pada penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.



Sumber : Kuncoro, 2006

Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953), yang mengatakan: *"a poor country is poor because it is poor"* (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka dapatkan. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tingkat tabungan dan investasi yang mereka miliki. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya ditujukan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 1997).

d. Ukuran Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan disuatu wilayah dapat didasarkan pada dua indikator yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut sedangkan kemiskinan relatif pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan (Tambunan , 2001).

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan pendapatan seseorang mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk dapat hidup setiap hari dimana kebutuhan minimum tersebut diukur secara finansial (uang). Nilai minimum tersebut kemudian digunakan sebagai batas garis kemiskinan yang ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara rill.

World Bank menggunakan ukuran kemiskinan absolut ini untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Menurut *World Bank*, penduduk miskin adalah mereka yang hidup kurang dari US\$1 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*). Akan tetapi, tidak semua negara mengikuti standar minimum yang digunakan World Bank tersebut, karena bagi negara berkembang pada level tersebut masihlah tinggi, oleh karena itu banyak negara menentukan garis kemiskinan nasional sendiri dimana kriteria disesuaikan dengan kondisi pada perekonomian negara masing-masing.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori (2.100 kilo kalori per kapita per hari) yang

dipergunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat sehingga proses penentuannya sangat subyektif. Mereka yang berada dibawah standar penilaian dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan.

Badan pemerintah yang menggunakan ukuran kemiskinan relatif misalnya BKKBN. BKKBN mendefinisikan miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera yang terdiri atas keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana. Sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, serta kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

2. Tingkat Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang belum bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran menurut *World Bank* adalah individu yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Jenis-jenis pengangguran menurut Sukirno (2000) berdasarkan keadaan yang menyebabkan, yaitu :

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan oleh seseorang yang meninggalkan pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karna arus pertumbuhan ekonomi. Penyebab terjadinya pengangguran structural antara lain, yaitu :

1) Persaingan global

Persaingan global efek dari produk luar negeri yang lebih murah dan lebih baik jika dibandingkan dengan produksi lokal; baik karena produksi luar negeri yang lebih efisien maupun adanya kebijakan luar negeri yang menyebabkan barang luar negeri yang lebih murah jika dibandingkan produk lokal yang ada. Hal ini mengakibatkan permintaan akan produk lokal menjadi semakin menurun. Produksi industri lokal menjadi tidak mampu bersaing dengan produksi yang ada di luar negeri, sehingga mengalami kebangkrutan, yang akhirnya akan memunculkan pengangguran.

2) Kemunduran perekonomian

Kemunduran perekonomian dalam suatu daerah dikarenakan adanya kemajuan tingkat perekonomian yang pesat di daerah lain, sehingga antara satu daerah dengan daerah lain tidak mampu bersaing, pada akhirnya daerah yang tidak mampu bersaing akan menghasilkan pengangguran

c. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang melebihi pengangguran ilmiah. Secara umum pengangguran konjungtur ini terjadi akibat adanya pengurangan permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat menyebabkan perusahaan harus mengurangi tenaga kerja yang ada pada perusahaan ataupun harus gulung tikar, sehingga memunculkan pengangguran konjungtur.

Jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya, yaitu :

- 1) Pengangguran Terbuka : baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena menginginkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan). pengangguran terbuka terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan namun terus bertambahnya tenaga kerja, sehingga yang terjadi banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pengangguran terbuka merupakan penduduk yang sudah memasuki usia angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan namun tetap mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai bekerja.

- 2) Setengah menganggur (*underemployment*) : yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal.
- 3) Tampaknya bekerja namun tidak bekerja secara penuh : mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbukadan setengah menganggur, diantaranya :
 - (a) Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) yaitu para petani yang bekerja di lading yang seharusnya tidak dikerjakan secara sehari penuh namun mereka mengerjakan secara sehari penuh.
 - (b) Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) yaitu orang yang bekerja tidak pada bidang pendidikannya.
 - (c) Pensiun lebih awal yaitu fenomena ini merupakan kondisi yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pensiun dipermudah sebagai alat yang diciptakan untuk membuat peluang bagi kaum muda untuk dapat menduduki jabatan di atasnya.
- 4) Tenaga kerja yang lemah (*impaired*) yaitu mereka yang bekerja *full time*. Namun keadaan fisik yang kekurangan gizi atau mempunyai penyakit.
- 5) Tenaga kerja yang tidak produktif yaitu mereka yang mampu bekerja secara produktif. Namun sumber daya komplementer yang kurang memadai, sehingga tidak dapat menghasilkan hasil yang baik

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut badan pusat statistik (BPS) merupakan jumlah nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh suatu unit, baik berupa barang maupun jasa di suatu wilayah . produk domestik regional bruto atas

atas dasar harga dihitung dari nilai tambah barang dan jasa yang berubah pada setiap tahunnya, digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi yang ada. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digambarkan dengan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar acuan yang ada, gunanya untuk melihat pola pertumbuhan dari tahun ke tahun.

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah dari barang dan jasa yang sudah dihasilkan dari kegiatan ekonomi diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dapat dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa dihitung dengan menggunakan harga yang ada pada tahun tertentu untuk dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

Cara penyajian PDRB disusun dalam dua bentuk, yaitu :

a) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Menurut BPS produk domestik bruto atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap yang berlaku. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari keseluruhan sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud adalah nilai yang sudah ditambahkan kepada barang dan jasa yang akan dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara Nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor yang diproduksi dalam proses produksi.

4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan adalah usaha perencanaan untuk dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar para peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya agar dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang diharapkan akan digunakan untuk mengembangkan potensi baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka dapat melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoatmodjo, 2003).

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan para peserta didik agar dapat menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab (Anwar, 2016).

BPS (2016) membagi menjadi dua jenis pendidikan yang ada di Indonesia yaitu :

- a) Pendidikan Formal, yaitu pendidikan yang sudah terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tersebut meliputi SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, SMA/MA/Sederajat dan Perguruan Tinggi.
- b) Pendidikan Nonformal yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara tersruktur dan berjenjang. Pendidikan Non-formal meliputi kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk dapat mengembangkan kemampuan peserta yang di didik.

Dalam upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan menjadi peran yang penting agar dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan yang mumpuni aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga akan meningkatkan peluang untuk menjadikan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan sangat penting dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain agar dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut

ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2004).

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Tambunan (2001) mengatakan bahwa pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain: 1) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*. 2) Jika rumah tangga tidak menghapai batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Hubungan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan juga didukung oleh teori lingkaran setan kemiskinan versi nurkse yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai rendahnya produktivitas seseorang. Hal itu dikarenakan penganggur tidak melakukan pekerjaan apapun untuk menghasilkan upah yang nantinya digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin banyak pengangguran maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan terus bertambah.

Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangipendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat

kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan

PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun, jadi semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka kemiskinan kecenderungan akan menurun. Todaro (2000) mengatakan pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Hal itu akan tercapai apabila tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara juga tinggi. Sejalan dengan itu, Kuncoro (2006) menyebutkan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang memfokuskan pada usaha peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah dikemukakan dengan menggunakan teori pertumbuhan endogen. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan dan pertumbuhan pendapatannya sangat lambat yaitu dibawah laju inflasi, maka barang dan jasa yang dapat dibelinya menjadi lebih sedikit.

Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Selain itu, syarat kecukupan (*sufficient condition*) adalah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan itu

hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.

Menurut Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur melalui berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. Karena hal tersebut, maka penurunan PDRB suatu daerah akan berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola konsumsi makanan pokoknya kebarang yang lebih murah dengan jumlah barang yang berkurang.

3. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pendidikan merupakan pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Sehingga, setiap bangsa yang ingin maju maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan. Namun ironisnya, pendidikan di Indonesia selalu terbentur oleh tiga realitas (Winardi, 2010).

Asumsi dasar teori *human capital* adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan pendidikan. Setiap bertambahnya satu tahun sekolah berarti, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam bekerja dan dapat meningkatkan penghasilan. Pendidikan merupakan pembentukan modal manusia yang berkualitas. Menurut Jeffrey Sachs (2005) di dalam bukunya "*The End of Poverty*" salah satu cara dalam penuntasan kemiskinan ialah pengembangan *human capital* terutama pada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan akan mempermudah seseorang untuk dapat cepat menyerap teknologi modern sehingga meningkatkan produktivitas yang berguna bagi pembangunan. Pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bisa dilihat dari meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keahlian dimiliki oleh setiap individu akan mendorong peningkatan produktivitas kerja pada seseorang. Perusahaan akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada tenaga kerja yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas dari kaum miskin dapat menyebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatannya akses pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada kaum miskin untuk dapat menjadi tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang tinggi. (Amaluddin,2014).

Pemerintah memiliki peran penting pada tingkat pertumbuhan terutama pada tingkat pembangunan modal manusia (*human capital*) dan pemerintah juga mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia (Permana, 2012). Bloom (2006) yang menyatakan bahwa pendidikan sangat berperan pada perbaikan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Tingkat pendidikan yang tinggi mampu memberikan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian yang didorong oleh pendidikan mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja seseorang. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas tinggi mampu memperoleh kesejahteraan yang lebih baik (Sitepu, 2010).

Dengan melakukan investasi pendidikan, maka akan meningkatkan produktivitas, peningkatan produktivitas akan meningkatkan pendapatan, pendapatan yang cukup akan mampu mengangkat kehidupan masyarakat dari kemiskinan. Oleh karena itu pendidikan merupakan hal yang penting untuk memutuskan rantai kemiskinan. Dalam mengukur dimensi pendidikan penduduk menggunakan salah satu indikator, yaitu rata-rata lama sekolah. Ketika masyarakat suatu daerah memiliki rata-rata lama sekolah yang tinggi maka akan menaikkan kualitas diripada masyarakat tersebut. Ketika kualitas sumberdaya manusia naik maka masyarakat akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih baik. Hal tersebut akan berdampak pada kenaikan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musa Al Jundi (2014) yang berjudul “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia*” bertujuan untuk melihat perbedaan tingkat kemiskinan antar provinsi dengan menjadikan salah satu provinsi sebagai basis perbandingan, dimana Provinsi DKI Jakarta menjadi basis penelitian. Model panel yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menggunakan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Hasil penelitian menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar harga Konstan berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat kemiskinan, Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian, variabel independen baik secara keseluruhan mempengaruhi secara signifikan dan sesuai dengan teori yang ada, sehingga dapat dipacu melalui program-program pemerintah guna menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sindi Paramita Sari, dkk (2016) yang berjudul “*Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan

PDRB variabel, pendidikan, dan pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan. PDRB dan pendidikan memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Myanti Astrini dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2013) yang berjudul "*Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali*". Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, asumsi klasik dan analisis pengaruh secara simultan (F) dan parsial (t). Hasil analisis berdasarkan empat variabel yang menunjukkan hasil uji F pengaruh secara simultan antara PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Uji t menunjukkan bahwa pengaruh dan tidak signifikan antara PDRB dengan kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Bali yang tidak merata. Pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena dengan meningkatnya angka melek huruf akan menurunkan angka buta huruf. Dan pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan sebab semakin rendah pengangguran maka kemiskinan akan menurun.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sussy Susanti (2013) dengan judul "*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel*". Analisis digunakan adalah analisis data panel. Studi ini meneliti tentang pengaruh PDRB, IPM dan pengangguran terhadap kemiskinan di

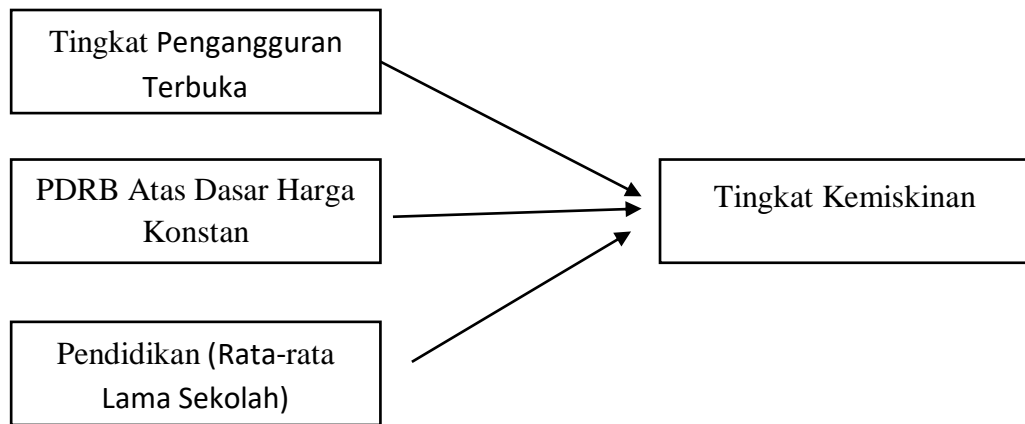
Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2009-2011. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana dan seberapa besar PDRB, IPM dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat,. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier panel data dengan bantuan *STATA 9*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang (2013) yang berjudul "*faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*". Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengangguran, dan Belanja Publik terhadap Kemiskinan. Analisis data menggunakan tehnik *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Hasil penelitian menunjukkan PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Amaluddin (2014) dengan judul "*Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di*

Provinsi Maluku". Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku periode 2008-2012, oleh menerapkan model regresi data panel. Penelitian ini menggunakan teknik *Fixed Effect Model* (FEM), juga disebut *Least Square Dummy Variable* (LSDV), diasumsikan bahwa koefisien kemiringan konstan antar daerah dan seiring waktu namun Intercept bervariasi antar daerah. Hasil estimator, penelitian ini menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) yang disebut juga *Cross Section Weight*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan pengurangan di Provinsi Maluku selama masa studi. Berdasarkan uji t-statistik, pendidikan diukur dengan rata-rata tahun sekolah dan tingkat melek huruf memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Variabel independen lainnya juga memiliki Hubungan negatif yang signifikan dengan tingkat kemiskinan adalah harapan hidup sebagai ukuran kualitas kesehatan dan infrastruktur sosialvariabel. Studi empiris ini menyimpulkan bahwa peningkatan pendidikan (rata-rata tahun bersekolah, tingkat melek huruf), kualitas kesehatan(harapan hidup) dan infrastruktur sosial akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.

D. Kerangka Penelitian



Gambar 2.2

Kerangka Penelitian

E. Hipotesis

- 1) Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- 2) Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- 3) Diduga Tingkat Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.